

ISSN 1412 - 0186



# LEMBUSUANA

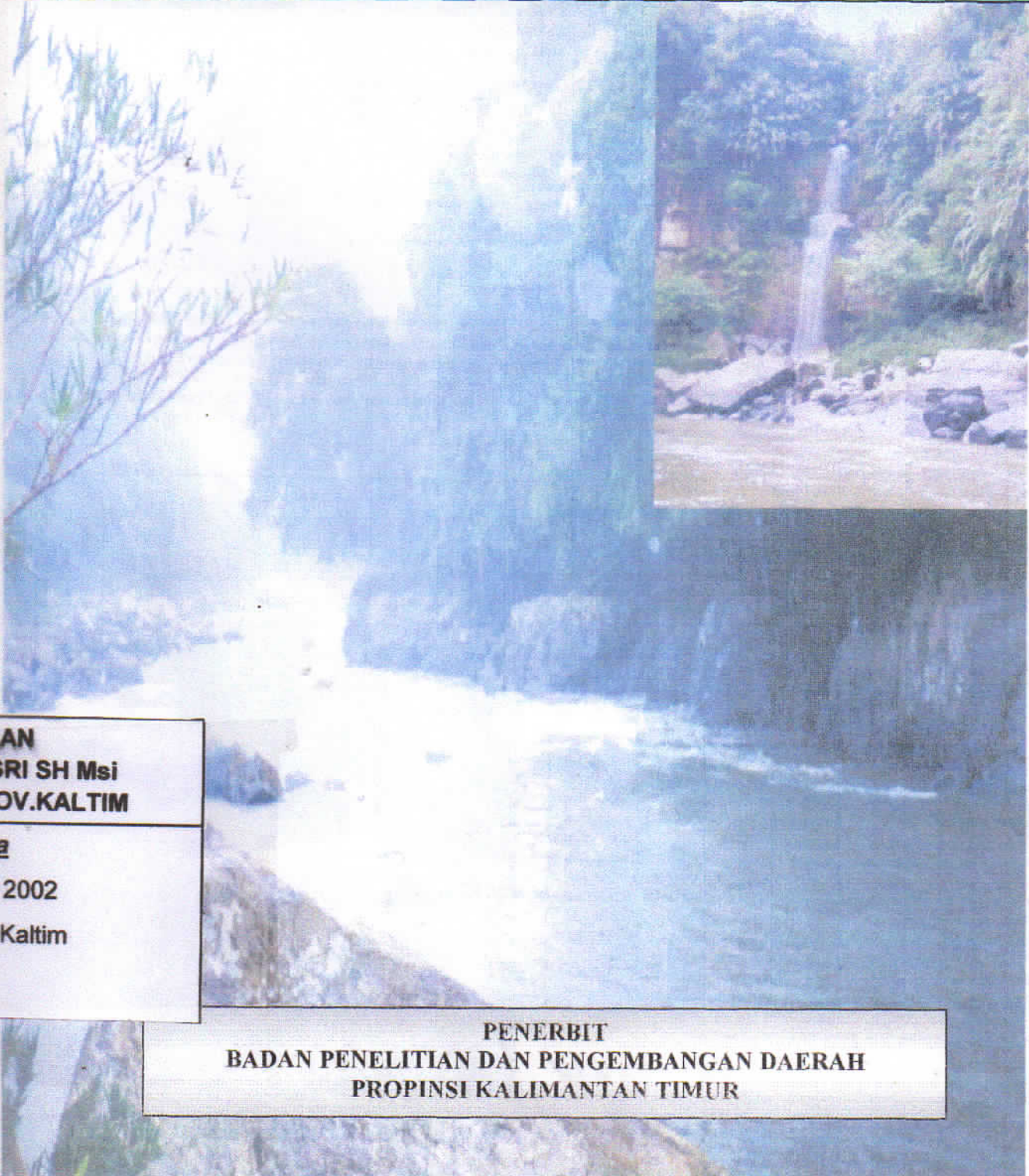


**MEDIA PENELITI - SEJARAWAN - BUDAYAWAN**

VOLUME II

NOMOR 13

BULAN APRIL 2002



AKAAN  
H ASRI SH Msi  
PROV.KALTIM

uana

April 2002

rov. Kaltim

36

**PENERBIT  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**



# PELAKSANAAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT 9 (SEMBILAN) BAHAN POKOK PADA DAERAH PEDALAMAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Yonathan Pongtuluran<sup>1</sup>

Michael<sup>2</sup>

Warsilan<sup>3</sup>

Halda Arsyad<sup>4</sup>

Syachrumayah Asri<sup>5</sup>

## ABSTRACT

Locations of this research are in sub districts areas that are given dispatch cost subsidy for sending nine basic foodstuffs to the hinterland and the border areas of East Kalimantan Province. Those areas are West Kutai regency (Long Apari sub district, Long Pahangai sub district, Bentian Besar Sub district) and Kutai Kertanegara regency (Tabang sub district). Then, for the comparative study, the researchs are conducted in two non-dispatch cost subsidy areas, Long Bagun sub district and Melak sub district.

The objective of the research is to explore the effectiveness of the dispatch cost subsidy management and to find out the solution for helping the people who live in the hinterland and border areas of East Kalimantan Province to overcome their economical problems.

The research used Quantitative and Qualitative descriptive analysis based on the people's perception which cover, living cost index, income per capita and non-parametric statistical analysis is used.

The research findings indicate that the income per capita per year at 4 sub district areas as the research study that receive dispatch cost subsidy are Long Apari sub district Rp. 1.850.225,-, Long Pahangai sub district Rp. 1.287.744,-, Bentian Besar sub district Rp. 1.097.767,- and Tabang sub district 1.320.009,-. However, if it is converted with the price of the rice sold in each sub districts that receive dispatch cost subsidy (Rp. 5.200,-/kg, Rp. 4.800,-/kg, Rp. 5.000,-/kg and Rp. 3.000,-/kg), the rice that every family could afford to buy in those sub districts are 356 kg; 268 kg; 220 kg and 440 kg. It means that from those 4 sub districts, two of them, Long Pahangai and Bentian Besar sub districts are still under poverty line based on Sajogyo criteria for village poverty level.

About the dispatch cost subsidy program in the area of study that has been running in the past 14 years, from 298 respondents sample, 187 respondents (62,69%) stated that the program is still cannot satisfy the society expectation. Nevertheless, the dispatch cost subsidy still needed by the society to overcome their economical problem until minimal thoroughfare infrastructure from isolated villages to the sub district is constructed. Next, to make the dispatch cost subsidy becoming effective, it is better if the dispatch cost subsidy management is centralized in each sub district that receive it.

Note : - "Sajogyo criteria" for village poverty line per year; Poor (320 kg), Poorer (240 kg) and the Poorest (180 kg).

- US\$ 1 = Rp. 10.000,-

## PE'DAHULUAN

Propinsi Kalimantan Timur merupakan propinsi terluas kedua di Indonesia setelah Irian

Jaya dengan luas wilayah kurang lebih 211.440 Km<sup>2</sup>.

Menurut angka sementara sensus penduduk di Kalimantan Timur tahun 2000 terdapat jumlah penduduk sebanyak 2.436.545 jiwa

dengan jumlah penduduk laki-laki 1.269.947 jiwa dan penduduk perempuan 1.164.252 jiwa dengan sex rasio 109,08 atau setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 109 jiwa penduduk laki-laki. Dari jumlah

<sup>1,2,3</sup> Peneliti Lemlit Univ. Mulawarman Samarinda

<sup>4</sup> Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbangda Prop. Kaltim

<sup>5</sup> Peneliti Balitbangda Prop. Kaltim



penduduk tersebut sekitar 54,86 % tinggal di daerah perkotaan dan 55,14 % diantaranya tinggal di daerah Kabupaten dengan tingkat penyebarannya tidak merata. Sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau dalam pembinaannya terutama pada musim kemarau. Mereka hanya menggantungkan hidupnya dari hasil-hasil pertanian dan hanya sebagian kecil mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan swasta maupun menjadi pegawai negeri dan ABRI. Pada musim kemarau tingkat kehidupan mereka cukup memprihatinkan karena disamping hasil-hasil pertanian mereka menurun juga sulitnya mendapatkan pasokan kebutuhan bahan pokok dari luar.

Dengan kenyataan inilah sehingga muncul kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk memprogramkan Subsidi Ongkos Angkut 9 (sembilan) bahan pokok dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman/ terpencil dan perbatasan.

Permasalahannya adalah meskipun ada suplai barang SOA, namun belum mampu menekan harga yang dapat dijangkau masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesenjangan harga 9 (sembilan) bahan pokok sekitar 20 % - 250 % antara pusat-pusat ekonomi (Kota) dengan daerah perbatasan tersebut karena terbatasnya kapasitas dan frekuensi angkutan yang digunakan untuk mendistribusikan bahan kebutuhan pokok serta faktor-faktor pembatas lainnya ke wilayah yang membutuhkannya. Akhirnya karena tidak adanya keseimbangan antara suplai 9 (sembilan) bahan pokok dengan kebutuhan masyarakat setempat baik yang dilaksanakan pemerintah, para donatur, serta yang disponsori oleh para LSM maupun yang dilakukan para pedagang secara mandiri menyebabkan barang tetap menjadi langka dan mendorong harga barang cenderung naik. Khusus yang

didatangkan sendiri oleh para pedagang pada jenis-jenis barang tertentu seperti Garam, Bensin, minyak tanah, biasanya terjadi kesenjangan harga yang cukup menyolok dikarenakan volume berat dan faktor keamanan pada barang tersebut.

### METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif (persepsi) yang dianggap cocok (sesuai persepsi masyarakat) dan mudah dipahami sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Analisis tersebut antara lain : Analisis Tabulasi, Deflator Biaya Hidup, Pendapatan Perkapita Penduduk di wilayah studi sekaligus distribusinya per Rumah Tangga konsumen dan analisis statistik non-parametrik ( $\chi^2$ ) untuk menginterpretasi dan mengestimasi data sampel dan populasi.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program subsidi ongkos angkut (SOA) dilakukan dengan metode "with and without" SOA dengan melibatkan sasaran daerah penerima SOA dan daerah yang tidak menerima SOA (sebagai control group). Adapun daerah yang menerima SOA : Kecamatan Long Apari; Kecamatan Long Pahangai; Kecamatan Bentian Besar; dan Kecamatan Tabang. Sedangkan daerah yang tidak menerima SOA (sebagai control group) dalam penelitian ini diantaranya Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Melak.

Setelah itu dihitung pula kebutuhan perkapita subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok, dan perhitungan alternatif diluar angkutan air (sungai) untuk mengetahui efektifitas subsidi ongkos angkut yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur ke daerah pedalaman/terpencil dan perbatasan. Maksimal dilakukannya perhitungan alternatif disini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah seandainya suatu saat subsidi angkutan 9 (sembilan) bahan pokok ke pedalaman diadakan (dihap sama sekali).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Efektivitas subsidi ongkos angkut bahan kebutuhan pokok

#### Distribusi Pendapatan di Wilayah Studi (Lihat Tabel.1)

Hasil perhitungan pendapatan Rumah Tangga per bulan pada daerah penerima subsidi ongkos angkut (SOA) di Wilayah Studi, un jelasnya dapat dirinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Pendapatan Responden Sampel Per Tahun, Tahun 2000

Pendapatan Responden Sampel	Jumlah	
	(F)	(%)
Sampai dengan Rp. 1.500.000,-	2	0,1
Rp. 1.500.001,- - Rp. 1.750.000,-	3	1,0
Rp. 1.750.001,- - Rp. 2.000.000,-	6	2,0
Rp. 2.000.001,- - Rp. 2.250.000,-	4	1,3
Rp. 2.250.001,- - Ke atas	182	54,6
<b>Jumlah</b>	<b>297</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer (diolah) 2001

Dalam Tabel 1 di menunjukkan bahwa sebagian besar responden sampel mempunyai pendapatan berkisar Rp. 2.250.000,- ke atas per tahun. Pendapatan rata-rata (Mean Statistic) ke 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) responden perhitungan tabel di atas adalah tahun untuk tahun 2000.

Dari Tabel 1 tersebut, dan pula dilakukan perhitungan rata-rata (Statistical Arithmetic Mean) perolehan pendapatan sampel (Mean) adalah Rp. 18.247.431,47,- dan menggunakan SDM dapat diket



jarak letak "Mean Parameter" atau "Mean Population" dalam tingkat kepercayaan 99% adalah Rp. 18.243.625,- - Rp. 18.262.450,-. Jadi rata-rata pendapatan responden sampel per tahun adalah Rp. 18.253.037,5,- untuk tahun 2000.

Dibandingkan dengan pendapatan responden antar wilayah studi penerima SOA (tidak termasuk Long Bagun) untuk tahun 2000 tidak terdapat perbedaan yang "Highly Significant" antara besarnya pendapatan yang diterima oleh responden antar wilayah studi tersebut. Secara statistik hal ini dapat ditunjukkan besaran t-test yang diperoleh lebih kecil dari t-daftar atau  $t\text{-test} = 1,68 < t\text{-daftar} (0,975) = 2,00$ .

**Pendapatan Perkapita dan Distribusinya di Wilayah Studi (Lihat Tabel.2)**

Berdasarkan perhitungan pendapatan total yang diterima penduduk terlihat nyata bahwa besarnya pendapatan perkapita di wilayah studi penerima SOA relatif homogen. Hal ini juga ditunjukkan oleh besarnya Nisbah Gini yang diperoleh. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2 Gini Coefficient dan Distribusi Pendapatan Perkapita di Beberapa Wilayah Studi

No	Wilayah Studi	Pendapatan perkapita (Rp.)/Thn	Gini Coefficient
1	Kecamatan Long Apari	1.850.225,-	0,26
2	Kecamatan Long Pahangai	1.287.744,-	0,13
3	Kecamatan Long Bagun	3.033.265,-	0,11
4	Kecamatan Melak	1.965.385,-	0,24
5	Kecamatan Bentian Besar	1.097.767,-	0,15
6	Kecamatan Tabang	1.320.000,-	0,28

Sumber : Data Primer (diolah), 2001

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita penduduk di wilayah studi masing-masing adalah Rp. 1.850.225,- (Kecamatan Long Apari); Rp. 1.287.744,- (Kecamatan Long Pahangai); Rp. 1.097.767,- (Kecamatan Bentian Besar); Rp. 3.033.265,- (Kecamatan Long

Bagun); Rp. 1.965.385,- (Kecamatan Melak) dan Rp. 1.320.000,- (Kecamatan Tabang).

Jika pendapatan tersebut dikonversikan dengan beras yang dapat dibeli berdasarkan harga beras yang berlaku di daerah setempat yaitu Rp. 5.200,-/kg (Kecamatan Long Apari); Rp. 4.800,-/kg (Kecamatan Long Pahangai); Rp. 5.000,-/kg (Kecamatan Bentian Besar); Rp. 4.500,-/kg (Kecamatan Long Bagun); Rp. 4.000,-/kg (Kecamatan Melak); dan Rp. 3.000,-/kg (Kecamatan Tabang), maka beras yang dapat dibeli oleh setiap rumah tangga dimasing-masing Kecamatan tersebut adalah 356 kg; 268 kg; 220 kg; 674 kg; 492 kg; dan 440 kg per kapita per tahun. Sehingga dapat dipastikan bahwa hanya pendapatan per kapita penduduk Kecamatan Long Pahangai dan Bentian Besar saja yang masih termasuk kategori rendah atau masyarakatnya berada dibawah garis kemiskinan (Kriteria Sajogyo)

Dilihat dari variasi pendapatan yang diterima antara rumah tangga penduduk dari masing-masing Kecamatan, ternyata terdapat variasi perbedaan yang signifikan antar individu atau rumah tangga konsumsi/biasa. Variasi tersebut antara lain diduga karena:

1. Keahlian yang dimiliki individu relatif tidak homogen,
2. Adanya perbedaan usia produktif kepala rumah tangga pencari nafkah,

3. Kemampuan daya beli individu/ rumah tangga yang relatif berbeda,
4. Produktivitas antar individu/rumah tangga besarnya relatif berbeda,
5. Adanya perbedaan besarnya dependency ratio antar rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pendapatan yang telah diterima oleh masing-masing rumah tangga konsumsi/biasa dimasing-masing Kecamatan wilayah studi merupakan refleksi empirik tentang hubungan antara "prestasi" dan "kontraprestasi".

Kebutuhan setiap individu atau keluarga dalam rumah tangga konsumsi/biasa bersifat relatif. Oleh sebab itu, pengukuran distribusi pendapatan berdasarkan "merit standard" akan menghasilkan distribusi pemerataan yang "commutative". Kontribusi standard yang di dasarkan pada "need standard" akan menghasilkan distribusi yang sekaligus menggambarkan kebutuhan dasar dan kebutuhan esensial setiap individu atau keluarga.

Selanjutnya dinamika rendahnya ketidak merataan distribusi pendapatan di wilayah studi dapat pula diperkuat dengan memperhitungkan Gini Coefficient dalam analisis.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kecilnya Gini Coefficient yang diperoleh seperti dalam tabel di atas bertendensi kecepatan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah studi masih rendah dibanding perkotaan yang sarat dengan aktivitas ekonomi serta prasarana dan sarana ekonomi skala besar. Namun demikian, besaran Gini Coefficient tersebut memberikan isyarat tidak terjadi kesenjangan pendapatan antara rumah tangga serta sifat-sifat kegotong-royongan penduduk lebih menonjol, yang tentunya penting diperhitungkan dalam memacu kecepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah studi di masa yang akan datang.

Garis kemiskinan pedesaan \*Kriteria Sajogyo\*: Miskin (320 kg); Miskin Sekali (240 kg); dan Paling Miskin (180 kg).



**Interpretasi Tentang Subsidi Ongkos Angkut (SOA)**

Untuk menginterpretasi dan sekaligus mengistimasi data populasi digunakan perhitungan:

- a. "Koefisien Chi Square" ( $\chi^2$ ) untuk menentukan perbedaan dalam data statistik (sampel) itu, karena kesalahan dalam menentukan sampel atau karena perbedaan sebenarnya. Dalam tingkat kepercayaan 99% (1 variabel yang dipertentangkan, berarti  $df = (1 \times 1)$ ).
- b. Untuk menghitung estimasi rata-rata populasi, digunakan "Mean Parameter" (M) dalam tingkat kepercayaan 99% dan 95% dengan tingkat kebebasan (1X1).
- c. Perhitungan ini berlaku untuk populasi kelompok sasaran (target group) dan instansi pelaksana program SOA serta aparat setempat di tingkat II dan Kecamatan.

**Pelaksana Program SOA oleh Instansi dan Penyalur di Wilayah Studi (Lihat Tabel.3)**

Dari 83 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima bantuan program SOA, 12 orang (14,46%) menyatakan pelaksanaan program SOA telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, 32 orang (38,55%) menyatakan kurang sesuai. Demikian pula 70 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, tidak seorang respondenpun menyatakan pelaksanaan program SOA telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, 16 orang (22,86%) menyatakan kurang sesuai, sedang sisanya 54 orang (77,14%) menyatakan tidak sesuai. Seterusnya, dari 59 responden

sampel Kecamatan Bentian Besar penerima bantuan program SOA tidak seorang respondenpun menyatakan pelaksanaan program SOA telah sesuai dengan keinginan  $\chi^2$  (45,32), Kecamatan Bentian Besar  $\chi^2$  (49,84) serta Kecamatan Tabang  $\chi^2$  (65,91). Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan bahwa pelaksanaan Program SOA di

**Tabel 3** Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program SOA Oleh Instansi dan Penyalur Untuk Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Bentian Besar serta Kecamatan Tabang.

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Pelaksana Program SOA							
		Sesuai		Kurang Sesuai		Tidak Sesuai		Jumlah	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
Long Apari	83	12	14,46	32	38,55	39	46,94	83	100
Long Pahangai	70	0	0	16	22,86	54	77,14	70	100
Bentian Besar	59	0	0	5	8,47	54	91,53	59	100
Tabang	46	4	8,70	24	52,17	18	39,13	46	100

Sumber : Data Primer (diolah) 2001

dan kebutuhan masyarakat setempat, 5 orang (8,47%) menyatakan kurang sesuai, sedang sisanya 54 orang (91,53%) menyatakan tidak sesuai. Demikian pula 46 responden sampel Kecamatan Tabang sebagai penerima bantuan program SOA, 4 orang (8,70%) menyatakan pelaksanaan program SOA telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, 24 orang (42,17%) menyatakan kurang sesuai, sedang sisanya 18 orang (39,13%) menyatakan tidak sesuai.

Perhitungan  $\chi^2$  (115,44%) dari perbedaan tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Program SOA dalam Tabel 3 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi. Demikian juga untuk Kecamatan Long Pahangai

daerahnya tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

**Penerimaan Masyarakat Tentang SOA di Wilayah Studi (Lihat Tabel.4)**

Dari 89 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima SOA, 81 orang (91,01%) menyatakan senang menerima SOA sedang sisanya 8 orang (8,99%) menyatakan tidak senang adanya SOA. Demikian pula 91 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, 89 orang (97,80%) menyatakan senang sedang sisanya 2 orang (2,20%) menyatakan tidak senang. Seterusnya dari 76 responden sampel Kecamatan Bentian Besar penerima SOA, 59 orang (77,63%) menyatakan senang menerima SOA. Demikian pula 51 responden sampel Kecamatan Tabang sebagai penerima SOA, 47 orang

**Tabel 4** Cara Penerimaan SOA Oleh Masyarakat di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Bentian Besar serta Kecamatan Tabang.

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Cara Penerimaan SOA					
		Senang		Tidak Senang		Jumlah	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
Long Apari	89	81	91,01	8	8,99	89	100
Long Pahangai	91	89	97,80	2	2,20	91	100
Bentian Besar	76	59	77,63	17	22,37	76	100
Tabang	51	47	92,15	4	7,84	51	100

Sumber : Data Primer (diolah) 2001



(92,16%) menyatakan senang, sedang sisanya 4 orang (7,84%) menyatakan tidak senang.

Perhitungan  $\chi^2$  (74,44%) dari perbedaan tanggapan masyarakat tentang cara penerimaan SOA dalam Tabel 4 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi. Demikian pula untuk Kecamatan Long Pahangai  $\chi^2$  (87,08), Kecamatan Bentian Besar  $\chi^2$  (68,42) serta Kecamatan Tabang  $\chi^2$  (43,62). Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan senang menerima SOA.

**Pembelian Masyarakat Terhadap Barang SOA di Wilayah Studi (lihat Tabel. 5)**

Tabel 5. Respon Masyarakat Terhadap Pembelian Barang SOA di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Bentian Besar serta Kecamatan Tabang.

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Respon Masyarakat Pembelian Barang SOA					
		Senang		Tidak Senang		Jumlah	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
Long Apari	89	75	84,27	14	15,73	89	100
Long Pahangai	91	76	83,52	15	16,48	91	100
Bentian Besar	76	4	5,26	72	94,74	76	100
Tabang	51	26	50,92	25	49,02	51	100

Sumber : Data Primer (diolah) 2001

Dari 89 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima SOA, 75 orang (84,27%) menyatakan selalu membeli barang SOA bila barang tersebut datang, sedang sisanya 14 orang (15,73%) menyatakan tidak pernah membeli barang SOA. Demikian pula 91 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, 76 orang (83,52%) menyatakan selalu membeli barang SOA, sedang sisanya 15 orang (16,48%) menyatakan tidak pernah sama sekali. Seterusnya, dari 76 responden sampel Kecamatan Bentian Besar penerima SOA, hanya 4 orang (5,26%) saja yang menyatakan membeli barang SOA, sedang

sebagian besar sisanya 72 orang (94,74%) menyatakan tidak membeli barang SOA. Demikian pula 51 responden sampel Kecamatan Tabang sebagai penerima SOA, 26 orang (50,92%) menyatakan membeli barang SOA, sedang sisanya 25 orang (49,02%) menyatakan tidak membeli barang SOA.

Perhitungan  $\chi^2$  (65,40%) dari perbedaan tanggapan masyarakat tentang pembelian barang SOA dalam Tabel 5 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi. Demikian pula untuk Kecamatan Long Pahangai  $\chi^2$  (65,94) dan Kecamatan Tabang  $\chi^2$  (25,50). Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan selalu

membeli barang SOA bila tiba di daerah setempat. Seterus Kecamatan Bentian Besar, perhitungan  $\chi^2$  (68,16) ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel

maupun populasi.

Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan bahwa selalu membeli barang SOA dengan alasan harganya dibawah harga barang non - subsidi.

**Tempat Pembelian Barang SOA (Lihat Tabel. 6)**

Dari 89 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima SOA, 31 orang (34,83%) menyatakan membeli barang SOA di toko/KUD setempat, 32 orang (35,96%) membeli di penyalur SOA. Sedang sisanya 26 orang (29,21%) membeli ditempat lainnya non KUD/toko dan bukan penyalur SOA. Demikian pula 91 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, 19 orang (20,88%) menyatakan membeli barang SOA di toko/KUD setempat, 70 orang (76,92%) menyatakan membeli barang SOA di penyalur SOA, sedang sisanya 2 orang (2,20%) membeli di tempat non-KUD/toko dan bukan penyalur SOA. Seterusnya dari 76 responden sampel Kecamatan Bentian Besar, 66 orang (86,84%) menyatakan membeli barang SOA di toko/KUD setempat, hanya 8 orang (10,53%) menyatakan membeli di penyalur SOA. Demikian pula 51 responden sampel Kecamatan Tabang sebagai penerima SOA, 25 orang (49,02%) menyatakan membeli barang SOA di toko/KUD setempat, 7 orang (13,73%) menyatakan membeli barang SOA di

Tabel 6. Respon Masyarakat Tempat Pembelian Barang SOA.

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Tempat Pembelian Barang SOA							
		Toko / KUD		Penyalur SOA		Lainnya		Jumlah	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
Long Apari	89	31	34,83	32	35,96	26	29,21	89	100
Long Pahangai	91	19	20,88	70	76,92	2	2,20	91	100
Bentian Besar	76	66	86,84	8	10,53	2	2,63	76	100
Tabang	51	25	49,02	7	13,73	19	37,25	51	100

Sumber : Data Primer (diolah) 2001



tempat penyalur SOA. Sedang sisanya 19 orang (37,25%) menyatakan membeli barang SOA di tempat lainnya non KUD/toko dan bukan penyalur SOA.

Perhitungan  $\chi^2$  (118,90%) dari perbedaan tanggapan masyarakat tentang pembelian barang SOA dalam Tabel 6 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi. Demikian pula untuk Kecamatan Long Pahangai  $\chi^2$  (148,86) dan Kecamatan Bentian Besar  $\chi^2$  (134,21) serta Kecamatan Tabang  $\chi^2$  (71,29). Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan selalu membeli barang SOA langsung kepada penyalur SOA setempat, namun frekuensi dan volume barang SOA masih sangat terbatas.

**Pemenuhan Bahan Kebutuhan Pokok di Wilayah Studi (Lihat Tabel.7)**

menyatakan dari toko/KUD setempat, sedang sisanya 22 orang (24,18%) menyatakan dari lainnya non subsidi atau toko/KUD. Seterusnya hanya 3 orang (3,95%) dari 76 responden sampel Kecamatan Bentian Besar, menyatakan sumber pemenuhan kebutuhan pokoknya berasal dari barang subsidi, 73 orang (96,05%) menyatakan berasal dari toko/KUD setempat. Demikian pula 51 responden Kecamatan Tabang, 7 orang (17,73%) menyatakan sumber pemenuhan kebutuhan pokoknya berasal dari barang subsidi, 44 orang (86,27%) menyatakan berasal dari toko/KUD setempat. Sedang sisanya orang (0%) menyatakan berasal dari lainnya non subsidi maupun toko/KUD.

Perhitungan  $\chi^2$  (46,98%) dari perbedaan tanggapan masyarakat tentang sumber pemenuhan bahan kebutuhan pokoknya dalam Tabel 7 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi.

**Tanggapan Masyarakat Tentang Program Subsidi Ongkos Angkut 9 Bahan Pokok yang telah berjalan (1987/1988-1999/2000) lihat Tabel 8**

Dari 89 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima SOA, 36 orang (40,45%) menyatakan bahwa SOA sangat bermanfaat, 14 orang (15,73%) menyatakan bermanfaat, 17 orang (19,10%) menyatakan cukup bermanfaat, 7 orang (7,87%) menyatakan kurang bermanfaat. Sedang sisanya 15 orang (16,85%) menyatakan bahwa SOA samasekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat. Demikian pula 91 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, 18 orang (19,78%) menyatakan bahwa SOA sangat bermanfaat, 21 orang (23,08%) menyatakan bermanfaat, 5 orang (5,49%) menyatakan cukup bermanfaat. Sedang sisanya 17 orang (18,68%) dari responden sampel menyatakan bahwa SOA samasekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Tabel 7. Sumber Pemenuhan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Bentian Besar serta Kecamatan Tabang.

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Tempat Pembelian Barang SOA							
		Barang Subsidi		Toko/KUD		Lainnya		Jumlah	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
Long Apari	89	34	38,20	55	61,80	0	0	89	100
Long Pahangai	91	26	28,57	43	47,25	22	24,18	91	100
Bentian Besar	76	3	3,95	73	96,05	0	0	76	100
Tabang	51	7	17,73	44	86,27	0	0	51	100

Sumber: Data Primer (diolah) 2001

Dari 89 responden sampel Kecamatan Long Apari sebagai penerima SOA, 34 orang (38,20%) menyatakan sumber pemenuhan bahan pokoknya berasal dari barang subsidi, 55 orang (61,80%) menyatakan berasal dari toko/KUD setempat. Demikian pula 91 responden sampel Kecamatan Long Pahangai, 26 orang (28,57%) menyatakan sumber pemenuhan bahan kebutuhan pokok berasal dari barang subsidi, 43 orang (47,25%)

Demikian pula untuk Kecamatan Long Pahangai  $\chi^2$  (70,24) dan Kecamatan Bentian Besar  $\chi^2$  (38,92). Jadi pada umumnya responden sampel menyatakan bahwa sumber pemenuhan bahan kebutuhan pokoknya sehari-hari lebih banyak bersumber dari toko/KUD setempat karena tidak ditemukannya barang SOA yang diharapkan harganya lebih murah.

Seterusnya, 2 orang (3,16%) dari 67 responden sampel Kecamatan Bentian Besar, 2 orang (3,16%) menyatakan bahwa SOA sangat bermanfaat, 1 orang (3,16%) menyatakan kurang bermanfaat. Sedang sisanya 1 orang (2,27%) menyatakan bahwa SOA samasekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat. Demikian pula responden Kecamatan Tabang, 7 orang (11,77%) menyatakan bahwa SOA sangat bermanfaat, 34 orang (66,67%) menyatakan kurang bermanfaat. Sedang sisanya 10 orang (5,88%) menyatakan bahwa SOA samasekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Perhitungan  $\chi^2$  (290,09%) perbedaan tanggapan masyarakat



tentang kemanfaatan SOA dalam Tabel 8 untuk Kecamatan Long Apari ternyata lebih besar dari  $\chi^2$  0,01 maupun  $\chi^2$  0,05 berarti perbedaan itu significant baik untuk sampel maupun populasi. Demikian pula untuk Kecamatan Long Pahangai  $\chi^2$  (244,75) dan Kecamatan Bentian Besar  $\chi^2$  (90,71) serta Kecamatan Tabang  $\chi^2$  (977,23%). Jadi pada umumnya responden sampel Kecamatan Long Apari menyatakan bahwa sebenarnya barang SOA sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat bila dikelola secara efektif artinya frekuensi, jenis dan volume barang SOA cukup tersedia setiap kali diperlukan masyarakat setempat.

### Sistem pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut (SOA)

Secara konseptual sebuah sistem abstrak adalah seperangkat unsur yang tersusun secara teratur dan saling melengkapi karena adanya suatu maksud, tujuan atau sasaran. Selain itu dikenal pula sistem fisik yang lebih dari pada sekedar konseptual, karena dapat memperlihatkan kegiatan atau perilaku manusia.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan akan sangat ditentukan oleh perilaku manusia yang terkait karena di bawah pengendaliannya. Demikian halnya program subsidi ongkos angkut bahan pokok ke daerah pedalaman di Kalimantan Timur yang merupakan program ke-manusiaan sehingga, perlu didukung sepenuhnya untuk membantu meringankan beban ekonomi terutama penduduk miskin. Penunjukan staf-staf pengelola barang SOA di tingkat Kecamatan harus selektif dan mencari

orang-orang yang jujur dan layak dipercaya.

Adapun sumber Dana selama ini berasal dari Pemerintah Pusat 50 %, Pemerintah Propinsi (Tingkat I) 25 % dan Pemerintah Kabupaten (Tingkat II) 25 %. Sistem pengelolaannya dipusatkan di Biro Ekonomi pada Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan proses pelaksanaannya dipercayakan kepada Kanwil Perdagangan Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Kanwil Perdagangan Propinsi Kalimantan Timur melakukan mitra kerja dengan pengusaha angkutan dan KUD. Bahan pokok dibeli di Samarinda dan ongkos angkutnya di tanggung pemerintah sampai ke daerah tujuan penerima SOA dengan harapan agar harga bahan pokok yang berlaku di daerah penerima SOA sama dengan harga yang berlaku di Samarinda. Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran-kebocoran dalam proses pelaksanaannya dilapangan dibentuk Tim Pengawas secara terpadu yang berasal dari kalangan Birokrasi. Namun demikian selama kurang lebih 14 tahun program SOA berjalan ternyata belum mampu memberikan hasil yang optimal.

Untuk itu sistem pengelolaan subsidi ongkos angkut agar dalam pelaksanaannya di masa datang dapat mencapai sasarnya dengan tepat, maka pengelolaan fisik barang SOA sebaiknya dipusatkan di Tingkat Kecamatan penerima SOA dibawah

pengawasan pihak independen dan Tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sedangkan yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan di bawah pengawasan Biro Ekonomi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai sentral pengkoordinasian dana SOA ke masing-masing daerah penerima SOA.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila pengelolaan barang SOA dipusatkan di Tingkat Kecamatan antara lain :

1. Mempererpendek jalur birokrasi untuk menghindari munculnya KKN.
2. Frekuensi pengangkutan, jenis dan volume barang SOA dapat diatur pemerintah Kecamatan sesuai dana yang tersedia serta kebutuhan penduduk setempat.
3. Secara vertikal Pemerintah Kecamatan dapat memper-taggiawabkan dan diawasi dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah Propinsi.
4. Pendistribusian barang SOA di masing-masing daerah penerima SOA akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat setempat dan Tim independen yang ditunjuk.
5. Mempermudah distribusi barang SOA kepada masyarakat yang paling membutuhkannya.
6. Menghindari adanya penjualan partai barang SOA kepada para pedagang setempat.

Tabel 8. Tanggapan Masyarakat Tentang Program Subsidi Ongkos Angkut 9 Bahan Pokok yang telah berjalan (1987/1988 - 1997/2000)

Kecamatan	Jumlah Responden Sampel	Sangat Bermanfaat		Bermanfaat		Cukup Bermanfaat		Kurang Bermanfaat		Tidak Bermanfaat	
		(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)	(f)	(%)
		Long Apari	36	40,45	14	15,73	17	19,10	7	7,87	15
Long Pahangai	18	19,78	21	23,08	5	5,49	30	32,97	17	18,68	
Bentian Besar	20	38,16	0	0	0	0	30	39,47	17	22,37	
Tabang	6	11,77	5	9,80	3	5,88	34	66,67	3	5,88	

Sumber : Data Primer (diolah) 2001



- Keamanan barang SOA lebih terjamin dan mudah dipertanggungjawabkan.
- Barang SOA tersedia setiap saat diperlukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama yang paling membutuhkannya.

Keberhasilan pengelolaan barang SOA di salah satu Kecamatan untuk mensejahterakan penduduknya terutama penduduk miskin akan menjadi contoh dan sekaligus memotivasi Kecamatan penerima SOA lainnya untuk mencapai hal yang sama.

Secara sederhana sistem program subsidi ongkos angkut dimulai dari berbagai sumber penyanggah dana (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumber donatur lainnya) Biro Ekonomi Pemerintah Propinsi → Pengelola (Tingkat Kecamatan masing-masing daerah penerima SOA) → *tender* → Penyalur → Depot SOA / KUD → Masyarakat.

Jadi untuk efektifnya pengelolaan barang SOA sebaiknya di dipusatkan di tingkat Kecamatan di bawah pengawasan *lim independen* dan tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing daerah penerima SOA. Pihak pengelola membuat Depot SOA atau bekerjasama dengan KUD dan pihak pemilik angkutan untuk mengangkut barang SOA dari Samarinda hingga ke masing-masing daerah penerima SOA. Barang SOA harus disimpan di Gudang/Depot untuk didistribusikan kepada masyarakat yang layak menerimanya setiap saat diperlukan. Mengenai dana pembinaan yang telah disetujui sebagian diserahkan kepada pihak jasa-jasa mereka dalam pengelolaan dan pendistribusian barang SOA kepada masyarakat. Adapun alokasi dana pembinaan diusulkan masing-masing Biro Ekonomi Pemerintah Propinsi Kaltim 30 %, Pengelola di tingkat Kecamatan 35 %, Tim pengawas terpadu (Pihak independen dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk) 20 % dan dana cadangan

penalangan barang SOA kepada para penyalur 15 % dari total dana pembinaan.

Untuk jelasnya mengenai sistem pengelolaan barang SOA di daerah pedalaman/terpencil dan perbatasan Kalimantan Timur secara sederhana dapat dilihat seperti gambar berikut ini :

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Pelaksanaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang kebutuhan pokok merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam upaya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di daerah pedalaman/terpencil dan perbatasan Propinsi Kalimantan Timur. Daerah-daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima SOA pada umumnya berlokasi jauh dari Ibukota Propinsi (Samarinda), dan sulit dijangkau terlebih di musim kemarau.
- Tingkat pendapatan per kapita penduduk per tahun pada masing-masing daerah penerima Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dari 4 Kecamatan yang diteliti menunjukkan; Kecamatan Long Apari Rp. 1.850.225,-, Kecamatan Long Pahangai Rp. 1.287.744,-, Kecamatan Bentian Besar Rp. 1.097.767,-, dan Kecamatan Tabang Rp. 1.320.000,-. Jika pendapatan tersebut dikonversikan dengan beras yang dapat dibeli berdasarkan harga beras yang berlaku pada masing-masing daerah Kecamatan penerima subsidi ongkos angkut yakni : Rp. 5.200,-/kg, Rp. 4.800,-/kg, Rp. 5.000,-/kg, dan Rp. 3.000,-/kg, maka beras yang dapat dibeli oleh setiap rumah tangga Kecamatan tersebut adalah 356 kg; 268 kg; 220 kg; dan 440 kg.
- Berdasarkan pada hasil perhitungan di atas, maka dari 4 Kecamatan penerima SOA yang diteliti tersebut 2 Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Bentian Besar keadaan ekonomi masyarakatnya masih di bawah garis kemiskinan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi ongkos angkut tanpa mengabaikan 2 Kecamatan penerima SOA lainnya yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Tabang. (Menurut garis kemiskinan pedesaan per tahun "Kriteria Sajogyo"; Miskin (320 kg); Miskin sekali (240 kg) dan paling miskin 180 kg).
- Mengenai pelaksanaan program subsidi ongkos angkut di wilayah studi selama ini, dari 298 responden sampel, 187 responden (62,69 %) menyatakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan program subsidi ongkos angkut di wilayah studi selama 14 tahun berjalan belum efektif. Meskipun demikian, subsidi ongkos angkut masih sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk meringankan beban ekonomi mereka hingga terbangunnya infrastruktur jalan tembus minimal dari desa-desa terpencil hingga ke ibukota Kecamatan.
- Ketidak efektifan pelaksanaan SOA terhadap barang keperluan pokok selama ini lebih disebabkan karena sistem pelaksanaannya mengandung banyak unsur kelemahan seperti panjangnya jalur birokrasi, kurangnya pengawasan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat Kecamatan, tidak adanya Tim pengawas dari pihak independen sehingga memungkinkan terdapat banyak kebocoran-kebocoran di lapangan.
- Seiring dengan upaya pemerintah untuk mensukseskan otonomi daerah, maka untuk lebih mengefektifkan pengelolaan subsidi ongkos angkut bahan pokok ke daerah



pedalaman/terpencil dan perbatasan Propinsi Kalimantan Timur di masa mendatang sebaiknya dipusatkan di tingkat Kecamatan masing-masing daerah penerima subsidi ongkos angkut (SOA):

**Saran-saran**

Dari uraian di atas, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan subsidi ongkos angkut ke daerah pedalaman/terpencil dan perbatasan di masa yang akan datang maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk menuju ke arah otonomi daerah, maka sebaiknya pelaksanaan program subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok langsung dikelola di tingkat Kecamatan dan diawasi langsung oleh pihak independen seperti LSM, Tokoh-tokoh masyarakat yang disetujui oleh pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten.
2. Perlunya penyediaan dana cadangan ( Dana siap ) yang dapat diperoleh dari dana pembinaan sebesar 15 % untuk menalangi pembayaran barang kebutuhan pokok terlebih dahulu kepada para penyalur di masing-

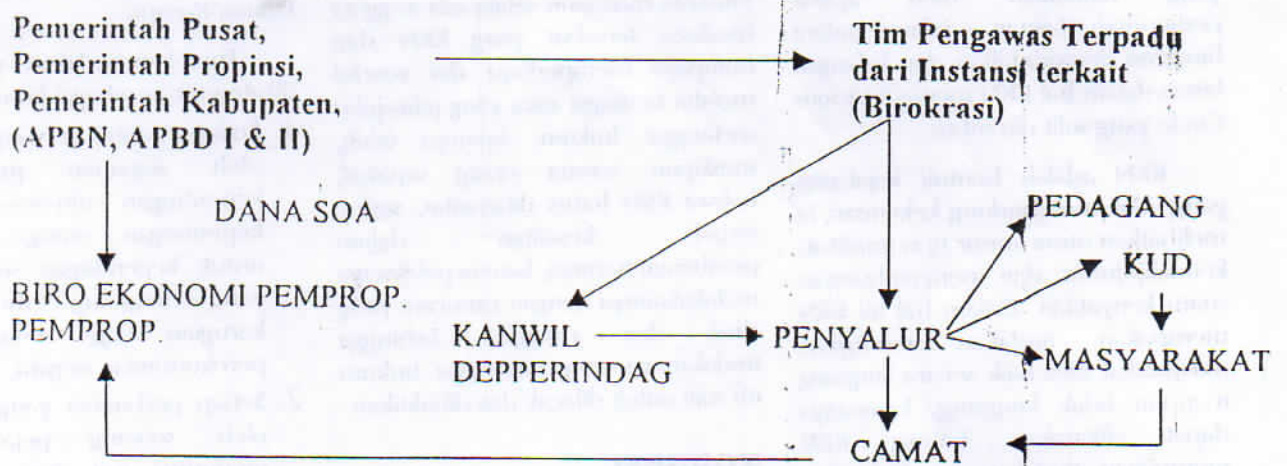
masing daerah penerima SOA agar tidak dilakukan penjualan partai kepada para pedagang setempat yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat yang berhak menerimanya.

3. Perlunya dibuat Depot khusus barang SOA di daerah- daerah Transit seperti di Kecamatan Long Bagun untuk tujuan ke Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari. Hal yang sama diadakan di Kota Melak untuk tujuan ke Kecamatan Bentian Besar. Khusus untuk tujuan ke Kecamatan Tabang Depot khusus barang SOA ditempatkan di Desa Sidomulyo (Depan Koramil) dan di Desa Rittan Baru untuk mengantisipasi musim kemarau.
4. Penunjukkan para penyalur barang SOA harus melalui tender sesuai peraturan yang berlaku.
5. Penyalur tidak diperkenankan mendistribusikan langsung barang SOA ke masyarakat agar jenis, volume dan kualitas barang mudah dipertanggungjawabkan.
6. Pendistribusian barang SOA kepada masyarakat harus dilakukan 1 pintu melalui KUD atau Depot SOA yang telah disepakati di masing-masing daerah penerima SOA.

8. Untuk mengefektifkan pendistribusian barang SOA di lapangan maka dana pembinaan perlu dialokasikan masing-masing Biro Ekonomi Pemerintah Propinsi 30 %, Pengelola di Tingkat Kecamatan 35 %, Tim pengawas independen terpadu 20 % dan dana cadangan untuk penalangan barang SOA ke pihak penyalur di masing-masing daerah penerima SOA sebesar 15 %.

9. Dari segi tingkat pendapatan per kapita masyarakat pada 4 Kecamatan penerima SOA di wilayah studi, 2 Kecamatan diantaranya masing-masing Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Bentian Besar masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah tanpa mengabaikan ke 2 Kecamatan Lainnya sebagai daerah penerima SOA yakni Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Tabang.

10. Peran proaktif para Kepala Desa bersama aparatnya di lapangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebocoran (KKN) dalam pendistribusian barang SOA yang dapat merugikan masyarakat di wilayah pemerintahannya.



Gambar 1 : Pola pelaksanaan subsidi ongkos angkut (SOA) bahan pokok



## Korupsi Kolusi & Nepotisme (KKN)

Hasyim Miradje

Penyimpangan dalam kegiatan birokrasi pemerintah semakin marak akhir-akhir ini apabila dicermati secara mendalam maka akan bermuara pada persoalan kronis tetapi sungguh sangat krusial, yaitu persoalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berbagai penilaian

darj lembaga dalam dan luar negeri telah berkali-kali menyebutkan bahwa kasus KKN di Indonesia sudah teramat parah. Sejumlah kasus dapat disebut untuk memperlihatkan betapa setelah sekian lama pemerintah membangun, cita-cita bagi terwujudnya clean government

belum juga dapat terpenuhi sehingga penyimpangan-penyimpangan tersebut masih terus terjadi dari tahun ke tahun di hampir semua jajaran birokrasi seperti terlihat pada tabel berikut ini :

KKN di 8 Departemen

No	Departemen	Jenis Kasus	Kerugian (Rp.)
1	Kehutanan & Perkebunan	HPH, HTI, Dana Reboisasi, Perijinan	73.916.424.875
2	Pekerjaan Umum	Kontrak jalan tol, Perumnas, Lahan gambut	3.625.000.000
3	Pertambangan dan Energi	Mitra usaha, proyek APBN	212.000.000.000
4	Dalam Negeri	Kerugian daerah	54.987.817.038
5	Perhubungan	Kontrak kalibrasi, Pramuka, PPD	1.187.445.000.000
6	Agama	Dana Haji, proyek APBN	2.816.903.056
7	Kuangan	PBB, dana fiskal, bea masuk fiktif (11563 kasus)	183.604.650.379
8	Pendidikan & Kebudayaan	Penyimpangan penggunaan dana	3.306.958.698

Sumber : Kompas, 7 Juli 1999

Berbagai catatan menunjukkan bahwa temuan-temuan dari lembaga pengawas keuangan terus meningkat baik dalam jumlah dana negara yang dislelewengkan maupun dalam banyak kasus penyimpangan dana yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Jalanan - jalanan antara birokrasi Pemerintahan dan kalangan bisnis dalam hal KKN menjadi Vicious Circle yang sulit ditembus.

KKN adalah bentuk kejahatan yang tidak mengandung kekerasan, ia melibatkan unsur-unsur tipu muslihat, ketidakjujuran dan penyembunyian suatu kenyataan. Dalam hal ini KKN merupakan tindakan merugikan masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, karenanya dapat dikatakan bahwa KKN merupakan tindakan kriminal yang dengan dalil apapun tidak dapat dibenarkan. KKN merupakan penyakit birokrasi yang harus diperangi sampai

ke akar-akarnya. Dengan demikian suatu pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) tidak pernah membenarkan tindakan KKN dilakukan oleh aparatnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di birokrasi manapun selalu ada anggota birokrasi terselut yang KKN dan berupaya memperkaya diri sendiri melalui berbagai cara yang jelas-jelas melanggar hukum. Ironinya ialah, meskipun semua orang sepakat, bahwa KKN harus diberantas, sering terjadi kesulitan dalam pemberantasannya, karena pelakunya melakukannya dengan cara-cara yang "licik dan canggih". Sehingga tindakannya yang melanggar hukum itu sulit untuk dilacak dan dibuktikan.

### KORUPSI

Rumusan eksplisit mengenai korupsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat

ditentukan sejak Peraturan Pemerintah Militer No. PRT/PM/06 tentang Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pada tahun 1957 atau dalam Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi ialah :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri-sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dan keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan

\* Staf Khusus Balitbangda Prop. Kaltim